

ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN E-PUSKESMAS PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN PIDIE

USMAN BOINI¹

¹Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur, Sigli
²Jurusan, Universitas, Kota
e-mail: usmanboini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Idra Jaya Kabupaten Pidie. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah para pegawai Puskesmas Indra Jayayag berjumlah 12 orang. Berpegang pada prinsip rasionalitas dan untuk mendukung validitas hasil penelitian maka ditetapkan jumlah sampel yaitu dari pegawai sebanyak 12 orang dari jumlah populasi secara purposive. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian, sedangkan data sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori implementasi yang penulis gunakan adalah menurut George Edward III. Bawa Implementasi adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik. Dalam pendekatan yang diteorekan oleh Edward III terdapat 4 indikator variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, observasi, dan wawancara. Penelitian ini berbentuk survey deskriptif yaitu dengan menarik sejumlah sampel dari populasi yang ada, memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner sehingga data tersebut diharapkan dapat menjawab penelitian yang diinginkan. Adapun hasil penelitian tentang bagaimana Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dinilai "Cukup Baik".

Kata Kunci: Analisis, Implementasi, E-Puskesmas

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang besar memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinai ke empat yang salah satu tujuan nya adalah "Memajukan kesejahteraan umum". Tujuan ini bila di pahami dalam konteks pembangunan kesehatan akan lebih mudah dipahami bahwa Negaralah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi kedua yaitu fungsi

pelayanan. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting yang menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar selain kebutuhan pangan dan juga pendidikan. Oleh karena itu masyarakat memang harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan pelayanan kesehatan yang memiliki kepedulian terhadap kebutuhan dan harapan serta nilai – nilai pelanggan yang menjadi titik tolak penyediaanlayanan kesehatan yang kemudian menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan merasa puas dengan pelayanan tersebut. Masyarakat

juga sangat berharap dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka hak – hak masyarakat sebagai pasien yang menerima jasa pelayanan tersebut dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, merata dan nondiskriminatif, sehingga hak pasien dapat terlindungi. Tujuan ini lebih di pertegas dalam undang-undang pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Namun dalam kenyatannya permasalah yang dihadapi masyarakat terkait masalah kesehatan sangatlah banyak diantara permasalah tersebut adalah pelayanan yang membutuhkan waktu yang sangat lama, pelayanan yang berbelit – belit dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya permasalahan seperti ini jika di tinjau dari berbagai sudut pandang penyebabnya bukan saja dari pihak pelayan yang melakukan pelayanan yang kurang baik tetapi dapat juga disebabkan oleh pasien yang mungkin memang kurang paham atau kurang teliti saat melengkapi persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan tersebut, sehingga pihak pelayan pun susah untuk memberikan pelayanan yang sesuai yang di harapkan. Oleh sebab itu disinilah peran pemerintah untuk menyeimbangkan faktor – faktor tersebut agar sama – sama dapat teratasi dan semuanya menjadi lebih mudah , efektif dan juga efesien, serta agar tidak ada pihak – pihak yang dirugikan.

Salah satu fasilitas yang menjadi garda terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan yang ada disetiap daerah adalah Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.

Dalam dunia kesehatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga

memberikan dampak dalam meningkatkan efesiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu prinsip penyelenggaraan puskesmas adalah penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Hal ini juga sesuai dengan instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan juga strategi pengembangan e- Government. E-Government itu sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang di pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu bentuk dari Reformasi Administrasi Publik.

Reformasi administrasi dapat dilakukan dengan cara penyempurnaan administrasi, penekanan baru terhadap program, perubahan sikap dan prilaku masyarakat dan aparatur pemerintah, perubahan gaya kepemimpinan yang diarahkan kepada kepemimpinan yang terbuka, penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan pendekatan yang legalistic (Hanh Been Lee, 1970).

Dengan melakukan perubahan yang inovatif terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan efektifitas administrasi instansi pemerintahan mampu menyediakan pelayanan tidak hanya menggunakan sistem konvensional melainkan juga dengan sistem elektronik (e-service quality). Berkembangnya layanan berbasis elektronik (e-services) di domain pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik yang berkwalitas tentunya membutuhkan sumber daya pendukung seperti infrastruktur/fasilitas, sdm, keuangan, regulasi dan lain sebagainya.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian survey deskritif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menhubungkan antara variabel satu dengan variabel yang

lain. Disini penulis langsung melakukan penelitian di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, dengan mensurvei langsung orang – orang yang berhubungan dengan peneliti yang penulis lakukan, sehingga penulis dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi.

Kemudian untuk memberikan arti dan makna dalam pemecahan masalah penulis menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiono (2016:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh peneliti melalui kuisioner yang telah disebarluaskan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, pangkat / golongan, dan usia responden. Dimana semua data ini berguna untuk perlengkapan dari pada penelitian yang penulis lakukan.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden dalam menghadapi suatu pekerjaan, dimana seorang pria bisa bekerja lebih cepat dari pada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapih dari pada pria dalam menentukan hasil dari pekerjaan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk itu diharapkan agar keduanya saling dapat mengisi dan melengkapi kekurangan sehingga tim kerja yang solid dapat tercapai. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan, dimana pria

biasanya lebih cepat emosional dari pada wanita.

2. Usia Responden

Usia responden sangat mempengaruhi kematangan seorang dalam bertindak dan berfikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya orang yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berfikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan didalam mengendalikan emosi apabila menghadapi suatu masalah dalam pekerjaannya. Namun demikian perlu diketahui bahwa semakin tua seseorang itu berarti kemampuan fisiknya akan berkurang daripada pegawai yang lebih muda . jadi usia tua dan muda mempunyai masing – masing kelebihan dan kekurangan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha guna memberikan pengembangan terhadap pola pikir kita dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku seseorang. Tidak jarang orang yang makan tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin matang pola fikirnya dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusanserta melaksanakan pekerjaan.

4. Masa Kerja

Masa kerja merupakan lamanya seseorang bekerja dalam suatu organisasi. Masa kerja juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku seorang pegawai dalam menjalankan suatu pekerjaan dimana pegawai yang memiliki masa kerja yang lama biasanya lebih memahami pekerjaan yang didalamnya serta dapat memberikan pengalamannya kepada pegawai yang baru.

Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie

Untuk mengetahui implementasi layanan e-puskesmas pada pusat kesehatan masyarakat di Kecamatan Indra Jaya

Kabupaten Pidie dapat dikemukakan dalam beberapa indikator :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah implementasi kebijakan yang efektif yaitu mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Indikator dari komunikasi memiliki 2 item penilaian yaitu sumber informasi dan kejelasan informasi. Untuk melihat tanggapan responden yakni pegawai Puskesmas Indra Jayabagian yang mengoperasikan langsung E-Puskesmas terkait dengan indicator komunikasi yang berada pada kategori Baik berjumlah 4 orang, sedangkan yang berada pada kategori Cukup Baik berjumlah 7 orang dan yang berada pada kategori Kurang Baik berjumlah 1 orang, berarti sebagian besar responden yaitu pegawai puskesmas menilai bahwa telah menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai pasien terkait dengan informasi penggunaan aplikasi e-puskesmas.

Selanjutnya untuk sub indicator Kejelasan Informasi dimana jawaban responden Puskesmas Indra Jayayang berada pada kategori Baik berjumlah 2 orang, sedangkan pada kategori Cukup Baik berjumlah 9 orang dan pada kategori Kurang Baik berjumlah 1 orang, berarti penilaian pegawai Puskesmas Indra Jayaterhadap sub indicator kejelasan informasi dirasa Cukup.

Analisis Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie pada indikator Komunikasi secara keseluruhan pelaksanaan sudak cukup baik, berdasarkan hasil observasi penulis implementasi E-Puskesmas di Puskesmas Indra Jayamemang belum maksimal tapi walaupun demikian dengan adanya aplikasi ini cukup memudahkan pegawai puskesmas dalam menginput data administrasi pasien. Pihak Puskesmas Indra Jayamemang belum ada melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi e-puskesmas karena aplikasi ini

hanya baru digunakan oleh internal puskesmas saja, tetapi ada kalanya saat pembuatan surat rujukan pasien pegawai puskesmas harus menjelaskan tentang adanya penggunaan aplikasi e-puskesmas ini karena ada sedikit perbedaan dengan yang konvesional sehingga pasien berhak tau. Berdasarkan jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tanggapan responden pegawai Puskesmas Indra Jayadan Kepala Puskesmas Indra Jayamengenai indicator Komunikasi adalah "Cukup Baik"

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Indicator sumber daya memiliki item penilaian sebanyak 3 item yaitu : Staf/SDM, Fasilitas dan anggaran. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai Puskesmas Indra Jayaterkait

indicator Sumber Daya.

Analisis Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie pada indikator Sumber Daya secara keseluruhan pelaksanaan sudak cukup baik, berdasarkan hasil observasi penulis fasilitas di Puskesmas Indra Jayamemang sudah cukup mewadai tetapi belum secara keseluruhan karena masih ada satu unit pelayanan yaitu poli Gizi yang belum menggunakan aplikasi e-puskesmas karena belum adanya komputer untuk menginput data dengan aplikasi e-puskesmas sehingga pelayana di poli Gizi masih manual. Untuk jaringan internet sendri Puskesmas Indra Jayasudah memiliki wifi sendri tetapi penggunaannya belum sesuai karena masih tergolong rendah kapasitasnya sehingga sering terjadi gangguan meskipun tidak selalu. Walaupun aplikasi e-puskesmas di Puskesmas Indra Jayabelum terintegrasi secara keseluruhan tetapi untuk tahap awal ini sudah bisa dikatakan cukup baik karena

pelayanan yang menggunakan aplikasi ini sangat meminimalisir waktu pelayanan. Berdasarkan jawaban di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tanggapan responden pegawai Puskesmas Indra Jayadan Kepala Puskesmas Indra Jayamengenai indicator Sumber Daya adalah “Cukup Baik”

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik Yang dimiliki oleh implementor. Seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi efektif. Berikut adalah jawaban responden pegawai Puskesmas Indra Jayaterhadap indicator Disposisi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar (Standart Operating Procedures Atau SOP). Berikut ini adalah tanggapan responden pegawai terhadap indicator Struktur Birokrasi.

Hambatan – Hambatan Dalam Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie

Adapun Yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Masih belum maksimalnya penggunaan aplikasi E-Puskesmas karena masih banyak fitur – fitur yang belum di operasionalkan

2. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Puskesmas Indra Jayadalam mencukupi kebutuhan dalam penggunaan aplikasi E-puskesmas
3. Kurangnya sumber daya pendukung seperti fasilitas yg terbatas dan juga gangguan jaringan internet yang dapat menganggu jalannya penggunaan aplikasi E-Puskesmas
4. Masih ada beberapa staff puskesmas yang masih minim pengetahuannya tentang komputer
5. Adanya double job yang harus dilakukan oleh pegawai Puskesmas Indra Jayakarena pelaporan kedinas Kesehatan Kabupaten masih menggunakan pelaporan manual sedangkan Puskesmas Indra Jayasudah menggunakan aplikasi e-puskesmas sehingga adanya ketidaksamaan format laporan. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Imelda Putri selaku Kepala Puskesmas Indra Jayadalam wawancara dengan penulis, bahwa memang format laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten beda dengan Format aplikasi E-Puskesmas karena untuk keseragaman format laporan memang harus disesuaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini, berdasarkan fenomena dan analisis hasil penelitian kepada responden Puskesmas Indra Jayamaka dapat ditarik kesimpulan “Bawa Implementasi Layanan E-Puskesmas Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie sudah terlaksana Cukup Baik”. Adapun arti dari Cukup baik dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Indra Jayadengan menggunakan Aplikasi E-Puskesmas

berdasarkan 4 indikator yang di gunakan bahwa ada sebagian indicator yang di nilai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan peraturan yang ada, walaupun ada sebagian indicator yang belum sesuai. Pada indicator Komunikasi kategori penilaian responden Pegawai Puskesmas Indra Jayatentang Implementasi Layanan e-puskesmas di Puskesmas Indra Jayaberada dalam kategori Cukup Baik. Untuk indicator Sumber Daya kategori penilaian responden Pegawai Puskesmas Indra Jaya tentang Implementasi Layanan e-puskesmas di Puskesmas Indra Jaya berada dalam kategori Cukup Baik.

Untuk indicator Disposisi kategori penilaian responden Pegawai Puskesmas Indra Jayatentang Implementasi Layanan e-puskesmas di Puskesmas Indra Jayaberada dalam kategori Cukup Baik. Untuk indicator Struktur Birokrasi kategori penilaian responden Pegawai Puskesmas Indra Jayatentang Implementasi Layanan e-puskesmas di Puskesmas Indra Jaya berada dalam kategori Cukup Baik.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubung dengan hasil penelitian ini yaitu antara lain :

1. Perlu di tingkatkan semangat kerja bagi pegawai sehingga tercapai mutu kerja yang baik dan kepuasan kerja yang diberikan tercapai, diantaranya perlu menambah keterampilan dengan jalan memberikan pelatihan khusus kepada pegawai yang mengoperasikan langsung E-Puskesmas di Puskesmas Bungaraya.
2. Sebaiknya puskesmas meminta bantuan dana kepada dinas kesehatan untuk mencukupi kebutuhan dalam penggunaan aplikasi e-puskesmas seperti sarana dan prasarana
3. Memberikan pelatihan khusus kepada pegawai puskesmas yang masih minim pengetahuannya tentang computer

sehingga bisa menjalankan aplikasi e-puskesmas dengan mudah

4. Hendaknya koordinasi antara pihak puskesmas dan dinas kesehatan berjalan dengan baik dan dapat direspon dengan cepat agar permasalahan pada saat pelaksanaan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. Seperti dalam hal format pelaporan puskesmas kedinas kesehatan agar tidak ada double job bagi para pegawai.

Daftar Pustaka

- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis. 2015. Teori Kebijakan Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Agustino, Leo. 2016. Dasar – dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
- Basuki, Johanes. 2018. Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris. Jakarta: : PT Rajagrafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Prima Grafika
- Burhan, Wirman. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Hardiansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: Mandala Maju
- Indriadi, Sjamsiar Sjamsudin. 2016. Dasar – Dasar Dan Teori Administrasi Publik. Malang: Inatrans Publishing
- Kartono & Kartini. 2014. Pemimpin dan kepemimpinan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Makdi, Beddy Iriawan. 2017. Dasar – Dasar Administrasi Publik Dari Klasik

- ke Kontemporer. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Mashur, Dadang. 2016. Administrasi Pembangunan. Pekanbaru: Alaf Riau
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit GAVA MEDIA
- Siagian, Sondang P. 2012. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2016. Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Siswanto, H.B. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara